

DAFTAR PUSTAKA

- Belinfante, A., & Bantuah, B. S. (1983). *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*. Bandung: Binacipta.
- Budiharjo, E. (1997). *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: Alumni.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Hasni, D. (2016). *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH*. Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA .
- HR, R. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII-Press.
- HR, R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Imam Kuswahyono, T. A. (2000). *Bunga Rampai Politik dan Hukum Agraria di Indonesia*. Malang: UM Press.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono. (2008). *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Murhaini, S. (2009). *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Samawi, I. (2003). *Membangun Bnatul di Era Otonomi*. Yogyakarta: Soerat Emas.
- Suratiyah, K. (2006). *Ilmu Usaha Tani*. Bogor.
- Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, A. Y. (2014). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana.
- Williams, R. (2001). *Klasifikasi Perencanaan Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Widiatama.
- Yusuf, D. T. (1997). *Pranata Pembangunan* . Bandung: Universitas Parahyangan.

Jurnal

- Bambang Irawan, “Meningkatkan Efektifitas Kebijakan Konversi Lahan”, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 26, Nomor 2, Tahun 2008
- Fathoni, “Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2018
- Hossaimah dan Slamet Subari, “Percepatan Alih Fungsi Lahan (Konversi) Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2017
- Ida Ayu Listia dan Ni Luh Made Pradnyawathi, “Dampak Sosial Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian Bagi Anggota Subak Kerdung di Kota Denpasar”, *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2016
- Lilik Anjar, Winny Astuti, dan Erma Fitria, “Tingkat Kualitas Permukiman (Studi Kasus: Permukiman Sekitar Tambang Galian C Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo)”, *Region Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2017
- M. Farizki, “Pemetaan Kualitas Pemukiman dengan Menggunakan Penginderaan Jauh dan SIG di Kecamatan Batam Kota”, *Majalah Geografi Indonesia*, Volume 21, Nomor 1, Tahun 2017
- Muh Iqbal dan Sumaryanto, “Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat”, *Analisis Kebijakan Pertanian*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2007
- Nurma Kumala Dewi dan Iwan Rudianto, “Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”, *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013
- Rifatul Jannah, Bambang Trisetoyo Eddy, dan Tutik Dalmyatun, “Analisis Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak”, *Agrisociomics*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017
- Suwitno Imran, “Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 3, Tahun 2013

Website

Heri Sidik, “Alih Fungsi Lahan Pertanian Bantul 40 Hektar”,
<https://jogja.antaraneews.com/berita/349126/alih-fungsi-lahan-pertanian-bantul-40-hektare> diakses pada 8 November 2018 pukul 12.07 wib

Sagita Enggar Pratiwi, “Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian”,
<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmp14c4598104full.pdf> diakses pada 23 Maret 2019 pukul 10.30 wib

Perundang-Undangan

R.I Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 No. 04 Seri C